

## Krisis Pengungsi Rohingya Dan Implikasinya Terhadap Stabilitas Keamanan Nasional Bangladesh

**Nailah Nur Azizah**

Universitas Hasanuddin, Departemen Ilmu Hubungan Internasional

[nailahnrzh@gmail.com](mailto:nailahnrzh@gmail.com)

**Agussalim Burhanuddin**

Universitas Hasanuddin, Departemen Ilmu Hubungan Internasional

[agus.unhas@gmail.com](mailto:agus.unhas@gmail.com)

Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10, Makassar  
Korespondensi penulis: [nailahnrzh@gmail.com](mailto:nailahnrzh@gmail.com)

**Abstract.** *The research in this journal discusses the Rohingya refugee crisis and its implications for Bangladesh's national security stability using the theory of National Security and Realism. The results using the library research method found that there were several impacts caused by Rohingya refugees, including in the fields of economy and health. The Bangladeshi government responded to the security shock by making several efforts to maintain the stability of its national security.*

**Keywords:** *National Security, Rohingya Refugees, Realism*

**Abstrak.** Penelitian dalam jurnal ini membahas tentang krisis pengungsi Rohingya dan implikasinya terhadap stabilitas keamanan nasional Bangladesh dengan menggunakan teori Keamanan Nasional dan Realisme. Hasil yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian *library research* ini menemukan bahwa terdapat beberapa dampak yang ditimbulkan akibat pengungsi Rohingya, di antaranya pada bidang ekonomi dan kesehatan. Pemerintah Bangladesh merespon guncangan keamanan tersebut dengan melakukan beberapa upaya untuk tetap menjaga stabilitas keamanan nasionalnya.

**Kata kunci:** Keamanan Nasional, Pengungsi Rohingya, Realisme

### LATAR BELAKANG

Jumlah kelompok pengungsi di dunia meningkat dan berdampak pada beberapa aspek seperti keamanan, kehidupan, dan keberlanjutan. Salah satunya adalah pengungsi Rohingya (Hossain, 2022). Rohingya merupakan kelompok etnis beragama Muslim yang berasal dari Myanmar bagian barat. Sejak Myanmar mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1948, warga Rohingya yang mayoritas tinggal di pesisir Rakhine tidak diakui keberadaannya sebagai warga sah negara Myanmar sehingga tidak memiliki kewarganegaraan (Shahin, 2023). Dalam Hukum Kewarganegaraan pada tahun 1982 menyebutkan bahwa Rohingya tidak termasuk ke dalam 135 etnis yang diakui, yaitu suku yang telah menjadi suku nasional di negara Myanmar sebelum dijajah oleh Inggris pada tahun 1924. Sedangkan Rohingya baru masuk ke Myanmar setelah Myanmar dijajah oleh Inggris (Azizah & Nurastuti, 2019). Bahkan, Undang-undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 telah menciptakan tiga tingkatan kewarganegaraan yang tidak setara. Yang pertama adalah tingkatan Warga Negara Penuh, yang kedua adalah

---

*Received: Mei 30, 2024; Accepted: Juni 15, 2024; Published: Juli 31, 2024*

\* Nailah Nur Azizah, [nailahnrzh@gmail.com](mailto:nailahnrzh@gmail.com)

tingkatan Warga Negara Asosiasi, dan yang ketiga adalah Warga Negara Naturalisasi sehingga dengan hadirnya tingkatan-tingkatan tersebut telah mencabut hak-hak beberapa kelompok etnis termasuk etnis Rohingya di Myanmar (Joarder *et al.*, 2020).

Pada tahun 2017, pengungsi Rohingya yang masuk ke Bangladesh adalah sebanyak 750.000. Para pengungsi tersebut datang ke Bangladesh dengan alasan mengalami diskriminasi dan penganiayaan dari negara otoritasnya (Ashraf, 2021). Di tahun yang sama, terjadi kekerasan di bulan Agustus 2017 sehingga memicu bertambahnya migrasi Rohingya yang mencapai jumlah 918.936 orang di Bangladesh per Juni 2018 (Joarder *et al.*, 2020). Etnis Rohingya disebut sebagai populasi tanpa kewarganegaraan terbesar di dunia. Eksistensi pengungsi Rohingya di Bangladesh ini menimbulkan tantangan tersendiri khususnya di bagian perbatasan dan keamanan publik sosial. Di antaranya adalah keterlibatan mereka dalam jenis kejahatan, seperti pembuatan dokumen palsu dan melakukan tindakan-tindakan kriminal. Beberapa organisasi internasional pun telah menyoroti masalah keamanan yang terjadi di Bangladesh akibat tindakan yang dilakukan oleh pengungsi Rohingya juga ikut membantu menyelesaikan krisis yang terjadi. Myanmar menanggapi tanggapan internasional terkait repatriasi<sup>1</sup> Rohingya dengan menandatangani perjanjian repatriasi bersama Bangladesh yang harusnya dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2019. Namun, hingga saat ini belum ada satu dari pengungsi Rohingya di Bangladesh yang kembali ke Myanmar. Upaya repatriasi yang gagal ini menjadi masalah keamanan yang berulang bagi negara Bangladesh dengan terus berdatangnya pengungsi Rohingya (Hossain *et al.*, 2020).

Banyaknya migran yang berimigrasi ke Bangladesh menimbulkan kekhawatiran keamanan tradisional dan non-tradisional. Salah satunya adalah kelompok militan yang bernama ARSA (*Arakan Rohingya Salvation Army*) yang dituduh melakukan pembunuhan pada hampir setengah pasukan keamanan Myanmar di tahun 2017. Oleh karena itu, badan keamanan Bangladesh mengkhawatirkan ARSA ini akan mencoba untuk merekrut orang-orang di *camp* pengungsian Bangladesh lalu menggunakannya sebagai basis pertempuran. Selain munculnya kelompok ARSA, terjadinya kegiatan penyelundupan obat-obatan terlarang yang disebut pil “Yaba” juga sangat tinggi. Sejak tahun 2018, pasukan keamanan Bangladesh yang terdiri dari polisi memperketat pengamanan dan pengoperasiannya untuk memberantas

narkoba. Sebanyak 50 juta pil Yaba dan 400 warga Rohingya ditangkap serta 72 penyelundup tewas dalam baku tembak dengan pasukan keamanan Bangladesh (Hossain *et al.*, 2020).

Berdasarkan uraian di atas, penulis memilih judul “Krisis Pengungsi Rohingya dan Implikasinya terhadap Stabilitas Keamanan Nasional Bangladesh” untuk melihat bagaimana negara Bangladesh mempertahankan keamanan nasionalnya yang terdampak akibat masuknya pengungsi Rohingya.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **1. Keamanan Nasional**

Keamanan Nasional mengacu pada situasi politik yang diorganisir menjadi kepentingan suatu negara (Kirshner, 2006). Konsep Keamanan Nasional diciptakan untuk menjadi sebuah ruang untuk mencapai kepentingan nasional demi mewujudkan kesejahteraan rakyat. Keamanan Nasional menjadi salah satu hal yang dapat dinikmati publik dan pemerintah adalah pihak yang mengaturnya. Oleh karena itu, keamanan nasional dapat dinikmati oleh semua warga negara dan bukan hanya dapat dinikmati oleh aktor keamanan. Hal tersebut bertujuan agar semua warga negara dapat ikut berkontribusi dalam mengkaji dan membahas isu-isu terkait keamanan nasional. Namun, sampai saat ini keamanan nasional masih menjadi suatu perdebatan yang belum kunjung usai, terutama ketika terjadi ancaman militer ataupun nirmiliter. Ancaman nirmiliter pun mulai bergeser menjadi lebih berkembang daripada ancaman militer, seperti contohnya ancaman nirmiliter yang pernah dihadapi seluruh negara adalah pandemi COVID-19 (Muhaemin *et al.*, 2020).

Dalam dunia yang saling terkoneksi ini, keamanan menjadi salah satu hal rumit yang dihadapi di muka bumi ini. Konsep keamanan menyentuh hampir semua aspek kontemporer di seluruh dunia, seperti keseimbangan politik, sosial, dan ekonomi (Taufiq, 2021). Para realis mendefinisikan negara sebagai aktor strategis untuk memperhitungkan untung dan rugi dalam pemilihan kebijakan dan pengambilan keputusan. Pada konteks ini, negara Bangladesh sebagai negara tuan rumah adalah aktor yang mengambil keputusan terkait kebijakan pengungsi dengan memaksimalkan manfaat dan meminimalisir kerugian. Adanya ancaman terhadap keamanan akan menimbulkan reaksi dari pemangku kekuasaan dalam proses perumusan kebijakan pengungsi, salah satunya adalah kebijakan repatriasi. Dengan datangnya pengungsi ke negara tuan rumah, tentunya para pengungsi ditempatkan di *camp* serta penyebaran keberadaannya dibatasi oleh pemukiman pengungsi. Dengan adanya kebijakan repatriasi, pemerintah negara

tuan rumah ingin memulangkan para pengungsi ke negara asalnya secara tertib. Apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan repatriasi tersebut, maka akan kembali berdampak pada keamanan negara tuan rumah (Ashraf, 2021). Bagaimana suatu negara sebagai tuan rumah yang menampung datangnya pengungsi untuk menjaga keamanan nasionalnya tentu akan menjadi lebih sulit. Eksistensi para pengungsi tentunya bersaing dengan sumber daya manusia masyarakat lokal, terutama untuk mendapatkan sumber daya alamnya yang terbatas. Penelitian yang dilakukan oleh (Sakib, 2023) menunjukkan bahwa masuknya pengungsi Rohingya menghadirkan dilema keamanan bagi negara Bangladesh dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selain itu, terdapat juga potensi terjadinya risiko terhadap stabilitas negara Bangladesh yang diakibatkan oleh faktor populasi (Sakib, 2023).

## **2. Realisme**

Dalam Hubungan Internasional, perspektif realisme bukan lagi hanya membentuk teori-teori mengenai politik internasional, tetapi sekaligus menawarkan tentang preskripsi politik internasional yang terjadi para era antarperang yang saat itu besar dipengaruhi oleh perspektif idealisme. Perspektif realisme hadir menyaingi perspektif idealisme sehingga sebagian besar pengaruhnya hilang karena dinilai tidak mampu memberikan preskripsi yang dapat membuat dunia internasional stabil pasca pecahnya Perang Dunia I. Salah satu pemikir realis, yaitu Morgenthau, membagikan hasil pemikirannya bahwa manusia dalam kondratnya secara esensial tidak akan berubah dan akan selalu haus akan *power*. Apabila dikaitkan dengan politik internasional, perjuangan untuk tercapainya kepentingan nasional suatu negara didefinisikan dalam batasan *power* dengan titik sentralnya adalah *balance of power*. Selain itu, Morgenthau (1948) dalam buku Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik) menuangkan enam prinsip perspektif realisme; politik diatur oleh sistem hukum yang objektif seperti aspek kehidupan manusia, politik internasional sangat terkait dengan *interests* atau kepentingan dalam batasan *power*, kepentingan sebagai *power* bersifat valid dalam kategori objektif dan tidak terpengaruh oleh ruang dan waktu; moral dapat memengaruhi tindakan politik dan *prudence* menduduki *virtue* paling tinggi dalam dunia politik, realisme menolak melakukan identifikasi terhadap aspirasi moral negara dengan hukum moral yang universal, dan realisme politik memiliki perbedaan yang jelas dibandingkan dengan mazhab pemikiran yang lain (Dugis, 2016).

Hubungan Internasional merupakan wadah untuk negara-negara dapat saling berinteraksi dengan negara sebagai aktor utamanya. Kebijakan atau perilaku yang dilakukan oleh suatu negara dalam interaksi hubungan internasional cenderung digerakkan oleh kepentingan nasional, khususnya *survival* atau tindakan untuk mempertahankan negaranya dan keamanan nasional. Dalam usaha untuk mencapai kepentingan nasionalnya, negara akan mengumpulkan kekuatan atau *power* terlebih dahulu. Ketidakseimbangan kekuatan kemungkinan besar akan terjadi di tengah persaingan antarnegara yang di antaranya disebabkan oleh kelangkaan sumber daya masing-masing negara dan kurangnya ‘wasit’ netral yang sepatutnya tidak akan membiarkan ketidakseimbangan *power* itu terjadi. Maka dari itu, *balance of power* atau perimbangan kekuatan menjadi salah satu konsep dalam perspektif realisme dengan mencerminkan sistem internasional yang bersifat anarkis untuk dapat menjaga kestabilan kekuatan antarnegara (Dugis, 2016). Perspektif Realisme dalam Hubungan Internasional menyoroti tindakan suatu negara mengambil kebijakan berdasarkan kepentingan nasionalnya. Dalam hal ini, bagaimana negara Bangladesh merespon masuknya pengungsi Rohingya yang memunculkan kekhawatiran terhadap keamanan negaranya. Adapun kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu negara dapat dibuat berdasarkan bagaimana keadaan negara tersebut terhadap kondisi aspek ekonomi, politik, sosial, lingkungan, dan lainnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berbasiskan *Library Research*, yaitu metode penelitian yang memperhatikan penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Teori Keamanan Nasional dan Realisme untuk mengkaji lebih dalam penerapannya dalam menganalisis bagaimana negara Bangladesh mempertahankan keamanan nasionalnya yang terdampak akibat pengungsi Rohingya. Studi literatur yang peneliti gunakan dalam metode *Library Research* adalah berupa pengumpulan data dari jurnal ilmiah, buku, *report*, ataupun artikel *website* yang membahas mengenai hal terkait pengungsi Rohingya di Bangladesh.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Ketidakstabilan Ekonomi dan Meningkatnya Angka Pengangguran**

Eksistensi pengungsi Rohingya dapat menjadi ancaman bagi stabilitas sosial ekonomi, politik, dan lingkungan Bangladesh. Hal ini dikarenakan etnis Rohingya hadir membawa kontradiksi antara kepentingan nasional Bangladesh dan keamanan manusia etnis Rohingya. Dalam hal ini, dampak yang dirasakan oleh masyarakat setempat pun bergantung pada berapa jumlah pengungsi di wilayah tersebut dan peraturan tentang integrasi dalam perekonomian lokal, seperti kesediaan terhadap izin kerja kepada pengungsi Rohingya. Banyaknya calon tenaga kerja tentunya dapat meningkatkan persaingan pasar di bidang tenaga kerja yang secara tidak langsung berdampak pada menurunnya upah penduduk lokal. Pengungsi masuk lalu diizinkan bekerja secara informal dan menggantikan warga yang bekerja di sektor tersebut. Hal ini bisa memengaruhi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah karena ketidakpuasan penduduk akibat pengungsi yang juga mendapatkan bagian sebagai angkatan kerja di negara tuan rumah (Sakib, 2023). Pemerintah negara Bangladesh telah sepakat memastikan bahwa keberadaan pengungsi di Bangladesh memberikan dampak merugikan dengan jangka waktu yang panjang. Kerugian ekonomi yang dialami Bangladesh terjadi pada terhambatnya pertumbuhan ekonomi di beberapa bidang, salah satunya adalah melonjaknya harga kebutuhan sehari-hari dan menurunnya jumlah gaji masyarakat. Nilai belanja pemerintah pun mengalami peningkatan di luar dari hibah dari negara lain. Beban ekonomi yang harus ditanggung oleh pemerintah Bangladesh terhadap pengungsi Rohingya ini kemungkinan akan terus bertambah apabila krisis ini berkepanjangan (Islam, 2023).

Cox Bazar yang merupakan kota tempat pemukiman pengungsi Rohingya di Bangladesh dimana mereka secara besar-besaran bermigrasi ke *camp-camp* yang ada di kota tersebut. Negara Bangladesh yang termasuk kategori negara miskin dan lemah, mengalami tekanan jumlah penduduk karena para pengungsi mengambil sebagian lingkungan hidup masyarakat dengan jumlah cukup besar hanya dalam kurun waktu kurang dari enam bulan. Meskipun terdapat bantuan dari internasional yang masuk, tetapi tetap tidak mencukupi kebutuhan ekonomi seluruh penduduk di wilayah perbatasan Bangladesh. Negara Bangladesh setiap tahunnya mengeluarkan kurang lebih 712,600 Triliun Taka (mata uang Bangladesh) untuk memenuhi kepentingan pengungsi Rohingya. Oleh karena itu, dampak yang diberikan oleh eksistensi pengungsi Rohingya di Bangladesh mencakup kekurangannya kebutuhan pangan lokal, terjadinya kelangkaan pasokan pangan, kebutuhan dan biaya transportasi, beban pariwisata, beban sumber daya alam, serta masalah-masalah sosial lainnya. Hal ini menjadi

tantangan besar bagi perekonomian Bangladesh hampir setiap harinya. Kenaikan harga yang terjadi hari demi hari lalu menciptakan ketidakseimbangan harga di pasar lokal. Selain itu, para pengungsi tidak dibiarkan bekerja sesuai dengan aturan, tetapi mereka dilibatkan sebagai pekerja dalam sektor garam dan pertanian kecil. Akibatnya, banyak buruh lokal yang perlahan-lahan kehilangan pekerjaannya dan menjadi pengangguran (Uddin, 2021).

Persaingan untuk mendapatkan pekerjaan akan menyebabkan penurunan upah bagi masyarakat Bangladesh dikarenakan para pengungsi bersedia untuk digaji dengan nominal yang lebih rendah. Apabila hal tersebut terjadi, ketegangan antara pengungsi dan masyarakat akan meningkat karena persaingan lapangan pekerjaan dan akan berdampak pada stabilitas keamanan Bangladesh dimana rawan terjadi diskriminasi. Selain itu, meningkatnya pengangguran relevan dengan meningkatnya angka kriminalitas yang diakibatkan karena tidak adanya pemasukan untuk mencukupi kehidupan sehari-hari oleh pengungsi Rohingya. Datangnya pengungsi Rohingya membuka lebih besar peluang masuknya perdagangan obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, dan perdagangan seks. Narkoba jenis “Yaba” yang berasal dari Myanmar dibawa masuk oleh etnis Rohingya, sehingga persentase remaja di Bangladesh yang terindikasi kecanduan narkoba mengalami peningkatan. Keadaan krisis yang tidak terprediksi akan dialami oleh pengungsi Rohingya memaksa mereka untuk melanggar hukum di negara tuan dengan melakukan kejahatan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sebab, pengungsi Rohingya pun berusaha dalam mencari pekerjaan, tetapi kebanyakan dari mereka gagal untuk mendapatkannya (Sakib, 2023).

## **2. Beban Layanan Kesehatan dan Layanan Publik**

Kota Cox Bazar dulunya adalah tempat bagi para pengunjung di Bangladesh. Namun, sekarang kota tersebut dipenuhi oleh organisasi-organisasi bantuan internasional. Bantuan vaksinasi yang sudah lama dapat diakses oleh masyarakat pun masih mengkhawatirkan tidak dapat menangkal bakteri dan penyakit menular lainnya (Uddin, 2021). Per bulan Juni 2018, terdapat hampir satu juta pengungsi Rohingya dari total 212.415 keluarga yang tinggal di Bangladesh. Berdasarkan *Early Warning Alert and Response System* (EWARS), pengungsi Rohingya rata-rata mengalami masalah kesehatan berupa demam tanpa sebab yang jelas, terjadinya infeksi saluran pernapasan akut, dan diare. Di tahun 2017, *camp-camp* pengungsi Rohingya dilanda wabah difteri dan wabah campak yang berlangsung dari bulan Desember 2017 hingga April 2018. Meskipun tidak ada sistem yang dapat mendeteksi terjangkitnya

penyakit tuberkulosis (TB) oleh pengungsi Rohingya di *camp*, penyakit tersebut dapat diantisipasi lebih awal mengingat bahwa negara Myanmar adalah salah satu dari 30 negara dengan penyakit TBC tertinggi. Untuk penyakit tidak menular, penelitian yang dilakukan pada bulan Maret 2018 melaporkan bahwa 51,5% pengungsi Rohingya menderita hipertensi dan 14,2% menderita diabetes. Selain itu, pada kalangan anak-anak sangat untuk terjadi kekurangan gizi. Studi berbasis populasi yang belakangan dilakukan terhadap pengungsi Rohingya di *camp-camp* mengemukakan bahwa hampir setengah dari anak-anak berusia 6 – 59 bulan mengalami stunting (Joarder *et al.*, 2020).

Sejak terjadinya krisis, banyak lembaga bidang kesehatan yang berusaha untuk membangun fasilitas, standarisasi, serta distribusi layanan kesehatan. Namun, hal tersebut merupakan sebuah tantangan pada saat krisis itu terjadi. Mengembangkan standar minimum untuk fasilitas kesehatan di *camp-camp* pengungsi menjadi salah satu prioritas utama. Oleh karena itu, terdapat dua tingkat layanan kesehatan utama yaitu pos kesehatan yang secara umum hampir sama dengan klinik kesehatan dan pusat kesehatan yang secara umum hampir sama dengan sub-pemerintah pusat dalam bidang kesehatan. Standar minimum yang ada lalu dikembangkan oleh anggota *Health Sector Strategic Advisory Group* (HSSAG) berdasarkan standar nasional dan global, termasuk “*Essential Health Service Package*” Bangladesh. Pada bulan November 2018, standar tersebut kembali ditinjau dan direvisi untuk disesuaikan dengan perubahan prioritas. Target dari jumlah pos kesehatan dan puskesmas cenderung menurun apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk. Hal ini terjadi diakibatkan oleh berkurangnya pendanaan yang diterima serta kebutuhan kualitas dari fasilitas kesehatan tersebut daripada kuantitas fasilitas kesehatan itu sendiri (Jeffries, *et al.*, 2021). Secara total, pengungsi yang tinggal di Cox Bazar menderita kelaparan, kekurangan gizi, dan keadaan darurat medis lainnya. Pada *Joint Response Plan* (JRP 2019), telah diidentifikasi bahwa terdapat lebih dari satu juta pengungsi Rohingya yang membutuhkan layanan kesehatan. Pengungsi Rohingya yang tinggal di *camp-camp*, setidaknya terdiri dari 52% perempuan yang dimana di antaranya berusia 18-59 tahun dan sekitar 22.000 perempuan di antaranya adalah ibu hamil. Layanan *Sexual and Reproductive Health* (SRH) menjadi salah satu layanan publik yang masih perlu perhatian signifikan (Sarker, *et al.*, 2020). Layanan-layanan kesehatan yang diperlukan terbebani dengan meledaknya populasi pengungsi Rohingya, sehingga fasilitas kesehatan yang tersedia harus menangani lebih banyak pasien yang menyebabkan kualitas layanannya menurun.



Selain pelayanan dalam bidang kesehatan, pelayanan publik juga terkena dampak dari masuknya pengungsi Rohingya dimana dapat menekan jumlah air bersih di negara tuan rumah. Ketahanan air dapat mengacu pada kondisi ketika air yang tersedia cukup dengan kualitas terjangkau untuk kesehatan manusia, ekosistem, dan pertumbuhan sosial ekonomi. Studi yang ditunjukkan oleh *Household Water Insecurity Experience Consortium* (HWISE) menunjukkan bahwa ketidakamanan air dapat terjadi bersamaan dengan program pemerintah terkait sanitasi air ataupun yang berkaitan dalam sektor kemanusiaan. Pengungsi Rohingya menghadapi banyak tantangan, salah satunya adalah tantangan mengenai sanitasi dan air. Dalam konteks *camp-camp* pengungsi Rohingya di Bangladesh yang padat penduduk, terdapat hubungan yang jelas antara sanitasi yang tidak memadai dengan pasokan air bersih. *Camp-camp* pengungsian pengungsi Rohingya di Cox's Bazar memiliki rata-rata kepadatan penduduk kurang dari  $15\text{m}^2/\text{orang}$ , dimana angka ini sangat jauh dari pedoman internasional yang mematok pada angka  $30\text{-}45\text{m}^2/\text{orang}$ . Dari angka tersebut, tergambar bahwa *camp-camp* pengungsian sudah sangat sesak. Penelitian yang dilakukan oleh (Akhter, *et al.*, 2020) mengemukakan bahwa dengan luas  $20\text{m}^2/\text{orang}$  bahkan tidak cukup untuk memberikan infrastruktur yang diperlukan, seperti pengolahan air dan limbah (Akhter, *et al.*, 2020).

### 3. Upaya Bangladesh Mempertahankan Keamanan Nasionalnya

Negara Bangladesh dalam tetap mempertahankan keamanan nasionalnya terhadap ketidakstabilan ekonomi dan meningkatnya angka pengangguran serta beban layanan kesehatan dan layanan publik telah melakukan beberapa upaya. Atas dasar kemanusiaan, pemerintah Bangladesh sendiri telah mengeluarkan beberapa upaya yang signifikan yang dapat mengakomodasi semua pengungsi Rohingya. Banyaknya jumlah etnis Rohingya telah membawa masalah ekonomi bagi negara tuan rumah, sehingga menciptakan kekhawatiran bagi Bangladesh baik dari segi keamanan maupun kemanusiaan (Rahman & Sakib, 2021). Masuknya pengungsi Rohingya ke Bangladesh menimbulkan kurang lebih empat jenis masalah keamanan. Pertama, hadirnya banyak kelompok militan Islam yang dalam hal ini berpeluang memiliki koneksi transnasional di Bangladesh, memunculkan kekhawatiran terkait pengungsi Rohingya yang berpotensi menjadi anggota dari kelompok ekstrem. Kedua, adanya kekhawatiran terkait jaringan penyelundupan senjata dan narkoba yang rentan memanipulasi kelompok etnis Rohingya ikut terlibat dalam perdagangan manusia. Ketiga, masuknya pengungsi Rohingya telah mengubah komposisi demografi wilayah Ukhia dan Teknaf yang terletak di sub-distrik Cox's Bazar, dimana komparasi populasi warga Rohingya dengan jumlah

warga lokal Bangladesh adalah sebesar dua banding satu. Keempat, masuknya pengungsi Rohingya membawa kekhawatiran masalah keamanan lingkungan yang serius di Bangladesh, terutama terhadap air tanah, air permukaan, kualitas udara, pengelolaan limbah padat, hutan alam, satwa liar, serta ekosistem laut dan air tawar (Rana & Riaz, 2023).

Selain ancaman keamanan non-tradisional seperti dalam bidang ekonomi, lingkungan dan jasa layanan, ancaman keamanan tradisional pun dikhawatirkan dapat memengaruhi stabilitas keamanan nasional Bangladesh. Meningkatnya hubungan antara gerakan separatis dan gerakan ekstrimisme di wilayah Myanmar tepatnya Arakan dan di negara-negara tetangga memberikan dampak yang cukup besar pada krisis pengungsi. Penolakan yang terjadi secara terus-menerus terhadap etnis Rohingya telah berkontribusi pada masalah pemberontakan dan ekstremisme. Militer Myanmar, Tatmadaw, menggunakan strategi untuk mengusir warga Rohingya dari negaranya dengan cara penyiksaan, pembakaran, mutilasi dan hal-hal kejam lainnya. Tindakan tersebut tentunya menyebabkan permusuhan antara etnis Rohingya yang beragama muslim dan etnis Rakhine yang beragama Buddha. Terbentuk beberapa kelompok pemberontak yang memerangi tindakan ekstrim pemerintah Myanmar, salah satunya adalah *Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA)*. ARSA merupakan kelompok yang dipimpin oleh Ata Ullah dan memiliki jaringan yang kuat di negara Arab Saudi, Pakistan, India, Bangladesh dan negara-negara muslim lainnya. Penelitian yang diteliti sebelumnya oleh (Taufiq, 2021) menunjukkan bahwa setiap kali pengungsi Rohingya masuk ke Bangladesh, maka tercipta suatu peluang besar bagi kelompok militan untuk dapat masuk. Kelompok pemberontakan yang beroperasi di perbatasan Myanmar dan Bangladesh di antaranya adalah *Arakan Army* dan *National Unity Party of Arakan (NUPA)*. Peluang para kelompok pemberontakan bersenjata ini untuk merekrut anggotanya selalu terbua setiap pengungsi Rohingya masuk di *camp* Bangladesh sejak tahun 1992 (Taufiq, 2021).

Negara Bangladesh mengusahakan terjaminnya kebutuhan dasar para pengungsi. Pemerintah telah menyediakan kebutuhan-kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan perawatan medid. Dalam program yang diselenggarakan oleh Bangladesh dan India, Perdana Menteri Bangladesh telah menyatakan bahwa krisis pengungsi Rohingya adalah suatu ancaman masa depan terhadap stabilitas regional dan lokal negara Bangladesh. Selain itu, beberapa Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) lokal maupun internasional telah menyediakan bantuan layanan lainnya bagi pengungsi Rohingya (Sakib, 2023). Untuk menyelesaikan permasalahan krisis pengungsi Rohingya, dibentuk rancangan strategi yang menjadi salah satu upaya untuk mempertahankan keamanan nasional Bangladesh baik dari kekhawatiran yang

mengancam keamanan tradisional maupun keamanan non-tradisional. Pemerintah Bangladesh merespon kekhawatiran yang terjadi akibat masalah keamanan tradisional terkait kelompok pemberontak bersenjata dengan menghadirkan *Armed Police Battalion (APBn)* untuk melakukan aksi penangkapan massal. *United Nations High Commissioner for Refugees* atau UNHCR bersama pemerintah Bangladesh pun bekerja sama untuk merelokasi *camp* pengungsian untuk menghadapi ancaman di wilayah tersebut. Permasalahan terkait pengangguran terjadi akibat persaingan dalam pasar tenaga kerja antara pengungsi Rohingya dan masyarakat Bangladesh. Oleh karena itu, badan PBB dan LSM di *camp* pengungsian memberikan tunjangan dengan memberikan perbekalan, pembanfunan, dan perbaikan tempat pengungsian sehingga para pengungsi di *camp* dapat mendirikan toko untuk menunjang kebutuhan pribadi mereka. Adapun rekomendasi dari *Center for Global Development* dengan melibatkan pemerintah Bangladesh, perusahaan swasta, dan lembaga keuangan internasional adalah untuk membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Pengembangan KEK diharapkan dapat menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat Bangladesh dan pengungsi Rohingya (Sullivan, 2022).

Pemerintah Bangladesh menempatkan pengungsi Rohingya di *camp* khusus yang dapat memudahkan kontrol dan pengawasan terhadap aktivitas para pengungsi, agar tidak menyebar ke daerah lain yang dapat menyebabkan ketegangan dengan masyarakat lokal setempat. Terdapat rancangan relokasi pengungsi Rohingya ke Bhasan Char yang terletak di Teluk Benggala. Pada bulan Oktober 2021, UNHCR bersama dengan pemerintah Bangladesh telah menandatangani nota kesepahaman terhadap persetujuan relokasi ke pulau tersebut. Pemerintah Bangladesh juga sudah menyediakan peluang mata pencaharian seperti memancing dan bertani, serta menyediakan transportasi bagi para pengungsi Rohingya untuk melakukan pemindahan (Sullivan, 2022). Dengan mengupayakan bantuan kerja sama dengan PBB khususnya UNHCR dan LSM lokal maupun internasional untuk mengakomodasi para pengungsi Rohingya, hal ini juga dapat memperkuat posisi diplomatik negara Bangladesh di dunia internasional. Diharapkan pula upaya ini dapat menunjukkan kekuatan Bangladesh dalam mengelola krisis pengungsi Rohingya di negaranya yang dapat menarik atensi lebih banyak pihak untuk melakukan investasi asing, sehingga dapat memperkuat kekuatan ekonomi dan stabilitas nasional.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Hadirnya pengungsi Rohingya di Bangladesh telah memengaruhi stabilitas keamanan nasional Bangladesh dalam beberapa hal. Yang pertama, timbulnya kekhawatiran tentang adanya potensi hubungan dengan kelompok militan transnasional seiring dengan masuknya pengungsi Rohingya ke Bangladesh. Potensi hubungan dengan kelompok militan ini akan membahayakan keamanan negara Bangladesh dalam segi regional juga membahayakan penduduk sipil. Yang kedua, timbulnya kekhawatiran tentang terbukanya jaringan penyelundupan senjata dan narkoba yang dapat memanipulasi terlibatnya pengungsi Rohingya hingga masuk dalam perdagangan manusia. Yang ketiga, populasi dari pengungsi Rohingya menyebabkan perubahan komposisi demografis beberapa wilayah tertentu di Bangladesh. Dampak dari perubahan komposisi demografis ini berkaitan dengan munculnya isu yang berkaitan dengan ekonomi, kesehatan, dan lingkungan khususnya kualitas air. Pemerintah Bangladesh mengatasi implikasi yang timbul serta tantangan keamanan yang terjadi akibat krisis pengungsi Rohingya dengan membentuk *Armed Police Battalion (APBn)* untuk mengamankan ancaman keamanan tradisional. Selain itu, untuk mengamankan ancaman keamanan non-tradisional, pemerintah Bangladesh melakukan kerja sama dengan UNCHR untuk merelokasi tempat pengungsian. Kerja sama juga dilakukan dengan LSM lokal dan internasional untuk menyediakan kebutuhan dan layanan dasar bagi para pengungsi, seperti layanan kesehatan, dan *provide* tempat tinggal.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segala pihak yang terkait atas penerbitan jurnal yang berjudul “Krisis Pengungsi Rohingya dan Implikasinya terhadap Stabilitas Keamanan Nasional Bangladesh”. Penulis mengharapkan bahwa jurnal ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam lagi terkait dampak pengungsi Rohingya di Bangladesh yang disertai analisis komprehensif menggunakan teori keamanan nasional dan realisme. Semoga jurnal ini dapat bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi para penuli selanjutnya

**DAFTAR REFERENSI****Buku**

Dugis, V. (2016). *Teori Hubungan Internasional Perspektif-Perspektif Klasik*. Surabaya: Cakra Studi Global Strategis.

Kirshner, J. (2006). *Globalization and National Security*. New York: Taylor & Francis Group.

**Artikel Jurnal**

Akhter, M., Uddin, S. M., Rafa, N., Hridi, S. M., Staddon, C., & Powell, W. (2020). Drinking Water Security Challenges in Rohingya Refugee Camps of Cox's Bazar, Bangladesh. *Sustainability*, 12, 1-26. <https://doi.org/10.3390/su1201xxxx>

Ashraf, A. A. (2021). Humanitarianism, National Security, and The Rohingya Refugee Policy of Bangladesh. *Strategic Analysis*, 45(3), 184-206. <https://doi.org/10.1080/09700161.xxxxxx>

Azizah, N., & Nurastuti, G. (2019). Krisis Rohingya di United Nations Security Council: Analisa Politik Birokratik. *Indonesian Journal of International Relations*, 2(2), 1-19. <https://doi.org/10.17303/ijir.2019.1.xxxxxx>

Islam, M. A. (2023). Rohingya Crisis in Bangladesh: Cause, Consequences and Remedies. *Journal of Social Science*, 2(10), 1113-1119. <https://doi.org/10.1016/j.jss.2023.09.xxxxx>

Jeffries, R., Abdi, H., Ali, M., Bhuiyam, A. T., Shazly, M. E., Harlass, S., . . . Baidjoe, A. (2021). The Health Response To The Rohingya Refugee Crisis Post August 2017: Reflections From Two Years of Health Sector Coordination in Cox's Bazar, Bangladesh. *PLoS One*, 16(6), 1-15. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.xxxxx>

Joarder, T., Sutradhar, I., Hasan, M. I., & Bulbul, M. M. (2020). A Record Review on the Health Status of Rohingya Refugees in Bangladesh. *Cureus*, 12(8), 1-8. <https://doi.org/10.7759/cureus.xxxxxx>

Muhaemin, Pawana, J., & Pambudi, K. S. (2020). Tinjauan Kementerian Koordinator Sebagai Alternatif Dewan Keamanan Nasional Indonesia. *Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia*, 8(2), 170-182. <https://doi.org/10.14710/jlkn.xxxxx>

Rahman, M. S., & Sakib, N. H. (2021). Statelessness, Forced Migration and The Security Dilemma along Borders: An Investigation of The Foreign Policy Stance of Bangladesh on The Rohingya Influx. *SN Social Sciences*, 1(7), 160. <https://doi.org/10.1007/s43545-021-xxxxx>

Rana, M. S., & Riaz, A. (2023). Securitization of the Rohingya Refugees in Bangladesh. *Journal of Asian and African Studies*, 58(7), 1274-1290. <https://doi.org/10.1177/0021909621xxxxxx>

- Sakib, A. B. (2023). Rohingya Refugee Crisis: Emerging Threats to Bangladesh as a Host Country? *Journal of Asian and African Studies*, 1-20. <https://doi.org/10.1177/0021909623xxxxxx>
- Sarker, M., Saha, A., Matin, M., Mehjabeen, S., Tamim, M. A., Sharkey, A. B., . . . Shahabuddin, A. S. (2020). Effective Maternal, Newborn and Child Health Programming among Rohingya Refugees in Cox's Bazar, Bangladesh: Implementation Challenges and Potential Solutions. *PLoS ONE*, 15(3), 1-18. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.xxxxx>
- Taufiq, H. A. (2021). Rohingya Refugee Crisis and The State of Insecurity in Bangladesh. *arXiv preprint arXiv:2107.12080*.
- Uddin, M. R. (2021). The Rohingya Refugee Crisis: Socio-Economic, and Environmental Impacts on Local Community in Bangladesh. *Journal of Asia Pacific Studies*, 6(2), 275-288. <https://doi.org/10.1177/0021909621xxxxxx>

### **Laporan**

- Sullivan, D. P. (2022). *Hope amid Despair: Finding Solutions for Rohingya in Bangladesh*. Washington DC: Refugees International.
- .